



Anggaran Perjalanan Dinas Rp11 Miliar Dialihkan untuk Padat Karya

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta bakal mengalihkan sejumlah anggaran perjalanan dinas untuk mendukung program padat karya. Langkah tersebut ditempuh, untuk menggerakkan perekonomian, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga masyarakat.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan, padat karya menjadi usulannya di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat. Termasuk, efisiensi perjalanan dinas DPRD Kota Yogyakarta yang semula sebesar Rp22 miliar, akan dipangkas hingga menyisakan 50 persen.

"Kita potong menjadi Rp11 miliar ya.

Saya rencanakan, yang Rp11 miliar itu bisa kita geser untuk kegiatan padat karya di (APBD) perubahan," katanya, Senin (14/4).

Menurutnya, para anggota legislatif pun berbesar hati menerima anggaran perjalanan dinas yang terdampak efisiensi dan dialihkan untuk padat karya. Bukan tanpa alasan, dengan padat karya, uang yang digelontorkan pemerintah bisa dirasakan langsung kemanfaatannya untuk warga Kota Yogyakarta.

"Kalau untuk perjalanan dinas kan larinya ke wilayah lain, untuk hotel, untuk transport. Tapi, tidak untuk rakyat. Makanya kami spirit-nya seperti itu.

Jadi, kita sama-sama," ujarnya.

Adapun program padat karya pertama yang digulirkannya berlangsung di Kampung Sidikan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Senin (14/4).

Di lokasi tersebut, Pemkot Yogya menggelontorkan Rp301.446.200, untuk pembangunan talud jalan permukaan sepanjang 111 meter dan tinggi 1,30 meter. Selaras tema padat karya, proyek dikerjakan sendiri oleh warga setempat.

"Ternyata di kota juga banyak pekerjaan yang bisa dipadat karya. Karena kalau kita melihat sekarang ini katakanlah ada efisiensi gitu, kemudian juga

daya beli ada penurunan juga," jelasnya.

"Maka, salah satu cara untuk mengatasi daya beli yang turun dengan cara seperti ini, dengan cara membagi rezeki kepada banyak orang. Salah satu caranya dengan padat karya," urai Hasto.

Ke depan, Hasto memastikan, program padat karya bakal semakin digencarkan, dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Misalnya, untuk merealisasikan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), atau pengentasan kawasan kumuh yang masih dijumpai di Kota Yogyakarta.

"Saya memang konsen, saya keliling ke mana-mana di warga ini, selalu yang

dikeluhkan itu, mbok nyuwun RTHP. Makanya, kalau saya lihat kayak gini, kan saya gemes," jelasnya.

Hasto menyebut, selama sudah ada lahan yang tersedia di lingkungan setempat, realisasi RTHP untuk ruang aktivitas warga tidak akan sulit. Terlebih, RTHP yang diminta masyarakat pun cenderung sangat sederhana, asalkan ada tempat 'nyore' sembari mengasuh anak.

"Sampai itu di Stasiun Lempuyangan itu saja, orang pada bawa anaknya di situ, kan. Aduh, terenyuh sih, kan ini saking apa ya, saking ngga adanya tempat untuk publik, untuk akses ruang terbuka," ujar Wali Kota. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005